

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki permasalahan pengangguran. Pengangguran adalah masalah yang sangat kompleks karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Masalah Pengangguran muncul karena tidak ada keseimbangan antara jumlah lapangan kerja yang tersedia dan jumlah tenaga kerja.

Situasi di negara-negara berkembang dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa pembangunan yang tercipta tidak mampu menciptakan lapangan kerja lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk saat ini. Oleh karena itu, masalah pengangguran mereka menjadi semakin serius dari tahun ke tahun.

Semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu negara, maka secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kemiskinan, mendorong tingkat keresahan dan kriminalitas serta dapat menghambat pembangunan jangka panjang Sukirno, (1994). Oleh karena itu, pengangguran harus segera diatasi agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih lanjut, karena perekonomian merupakan suatu sistem sosial yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Berikut data pengangguran yang ada di Pulau Jawa:

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Pulau Jawa Tahun 2021-2022

TPT Menurut Pulau Jawa (Persen)		
Provinsi	Tahun	
	2021	2022
DKI Jakarta	8,50%	7,18%
Banten	8,89%	8,09%
Jawa Barat	9,82%	8,31%
Jawa Tengah	5,95%	5,57%
DI Yogyakarta	4,56%	4,06%
Jawa Timur	5,74%	5,49%

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat(diolah)

Berdasarkan pada Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pulau Jawa bahwasanya tahun 2021 urutan tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada Provinsi Jawa Barat sebesar 9,82% dan tahun 2022 urutan tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada Provinsi Jawa Barat sebesar 8,31%. Hal tersebut membuktikan bahwa Provinsi Jawa Barat termasuk kategori Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang paling tertinggi di Pulau Jawa.

Tingginya angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakseimbangan antara kesediaan lapangan pekerjaan dan permintaan akan kesempatan kerja, rendahnya tingkat pendidikan seseorang memasuki dunia pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, kemajuan teknologi, rendahnya keterampilan, tingkat

kemiskinan, krisis ekonomi dan kurangnya minat pribadi pada bidang pekerjaan tertentu.

Secara umum, pengangguran mempunyai dampak negatif terhadap individu dan kesehatan mental masyarakat secara kolektif. Salah satu cara untuk keluar dari situasi ini adalah dengan mencari pekerjaan. Namun, berdasarkan teori penentuan nasib sendiri (SDT), berbagai alasan para penganggur (yaitu motivasi mereka) untuk terlibat dalam pencarian kerja memengaruhi kesejahteraan, sikap, dan perilaku mereka, baik atau buruk. Berdasarkan kepercayaan ini cuplikan ayat yang menerangkan agar populasi pengangguran di Indonesia bisa berkurang, maka di dalam Surat Ar-Ra'd ayat 11 di jelaskan sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُ
بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS Ar-Ra'd: 11).

Salah Satu untuk mengukur tingkat pengangguran terbuka adalah pengaruh inflasi terhadap pengangguran dapat terjadi setiap tahun, hal ini akan meningkatkan tingginya angka pengangguran serta mempengaruhi taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Bagi daerah yang perekonomiannya baik tentu saja tingkat inflasi di daerah tersebut rendah, namun ada juga daerah yang tingkat inflasinya sangat tinggi yang disebut dengan hiperinflasi. Jika suatu daerah mengalami hiperinflasi, maka jumlah pengangguran di daerah tersebut tentu akan meningkat tajam, karena meningkatnya harga-harga di semua sektor, maka perusahaan juga akan melakukan tindakan pengurangan tenaga kerja. pengaruhnya adalah tingginya angka pengangguran dan perekonomian yang bermasalah.

Tabel 1. 2 Tingkat Inflasi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Tahun	Inflasi	Perubahan
2018	3.54%	-0.09%
2019	3.21%	-0.33%
2020	2.18%	-1.03%
2021	1.69%	-0.49%
2022	6.04%	4.35%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 1.2 tahun 2018 sampai 2022 Inflasi Jawa Barat menurun, dimana pada tahun 2018 menurun -0,09% tahun 2019 menurun -0,33% tahun 2020 menurun -1,03% dan tahun 2021 menurun -0,49% oleh sebab itu inflasi pada tahun 2018 sampai 2021 tetap berada pada

level yang rendah dan tidak stabil. Hal tersebut Sebaiknya dalam perkembangan Bank Indonesia terus meningkatkan kerja sama dalam kebijakan dengan pemerintah baik dalam tingkat nasional maupun lokal.

Tahun 2022 Inflasi Jawa Barat memiliki nilai paling tinggi diantara nilai inflasi pada tahun 2018 sampai 2022 yaitu 6,04% meningkat sebesar 4,35%. Menurut Bank Indonesia Inflasi Jawa Barat tersebut merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan *stakeholders* dalam kerangka pengendalian inflasi. Beberapa program yang dilakukan antara lain Operasi Pasar Murah dan Gelar Pangan Murah, penguatan sisi hulu sektor pertanian melalui pengembangan sarana produksi pangan, *urban farming* melalui *screen house* dan *organic tower garden*, serta perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD).

Pengaruh angkatan kerja terhadap pengangguran di sebabkan karna adanya ketidakseimbangan dengan kesempatan kerja yang terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar dari pada kesempatan kerja yang tersedia. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi berkurang. Diharapkan pemerintah berkomitmen untuk memperbanyak pembukaan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak untuk mengurangi angka pengangguran yang berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan.

Tabel 1. 3 Tingkat Angkatan Kerja Jawa Barat Tahun 2018-2022

Tahun	Angkatan Kerja	Perubahan
2018	22.814.361	1,89%
2019	23.993.348	5,17%
2020	24.207.930	0,89%
2021	24.743.628	2,21%
2022	25.578.174	3,37%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa perkembangan angkatan kerja setiap tahun meningkat, dimana tahun 2018 meningkat 1,89% tahun 2019 meningkat 5,17% tahun 2020 meningkat 0,89% tahun 2021 meningkat 2,21% dan tahun 2022 meningkat 3,37% artinya angkatan kerja di Jawa Barat umumnya bekerja atau masih mencari pekerjaan, namun demikian mereka berstatus menganggur juga harus menjadi perhatian pemerintah, swasta dan masyarakat, karena jika dibiarkan akan memicu terjadinya masalah sosial, sehingga akan mengganggu keharmonian kehidupan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Sebenarnya masalah ketenagakerjaan yang paling menonjol sampai saat ini adalah pengangguran. Secara sederhana pengangguran disebabkan oleh dua hal yaitu banyaknya tenaga kerja dan atau sempitnya kesempatan kerja.

Menurut Saputra & Mudakir, (2011) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka yang mengukur pencapaian pembangunan manusia

berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan seseorang. Pembangunan manusia memainkan peran penting di negara-negara yang memanfaatkan teknologi modern untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan mengembangkan kemampuan yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang diukur dengan nilai IPM yang tinggi berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pengangguran wilayah. (Mahroji & Nurkhasanah, 2019).

Tabel 1. 4 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat Tahun 2018-2022

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia	Perubahan
2018	72,30%	1,61%
2019	72,03%	-0,27%
2020	72,09%	0,06%
2021	72,45%	0,36%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 1.4 menunjukkan bahwasanya Indeks Pembangunan Manusia menurun, dimana tahun 2018 menurun 1,61% tahun 2019 menurun -0,27% tahun 2020 0,06% oleh sebab itu Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat pada tahun 2018 sampai 2020 berada level yang rendah hal ini terjadi karena penduduk yang miskin mempunyai keterbatasan dalam mengakses kebutuhan mereka termasuk dalam

memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu implikasinya akan dapat menurunkan IPM Jawa Barat. Sedangkan Tahun 2021 sampai 2022 IPM Jawa Barat meningkat, tahun 2021 meningkat 0,36% dan tahun 2022 meningkat 0,67%.

Pengaruh berikutnya yang dapat mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Upah Minimum Kabupaten/kota. Upah Minimum didefinisikan oleh Wijaya, (2014) sebagai suatu penerimaan bulanan terendah (minimum) sebagai imbalan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan. Kebijakan upah minimum dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Penetapan upah minimum juga mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi untuk mengatur perusahaan.

Tabel 1. 5 Tingkat Upah Minimum Jawa Barat Tahun 2018-2022

Tahun	Upah Minimum	Perubahan
2018	1,544,361.00	-11.33%
2019	1,668,373.00	8.03%
2020	1,810,351.00	8.51%
2021	1,810,350.00	0.00%
2022	1,841,487.00	1.72%

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 1.5 Upah minimum Jawa Barat setiap tahun meningkat dimana, tahun 2018 meningkat 8,71% tahun 2019 meningkat 8,03% tahun 2020 meningkat 8,51% tahun 2021 meningkat 00,00% tahun 2022 meningkat 1,72% artinya UMR dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan, indeks harga konsumen, kemampuan untuk pekerjaan, pembangunan dan keberlanjutan, ada juga gaji umum yang berlaku antar daerah, pasar tenaga kerja, pembangunan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Sirait dkk., (2018) yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jambi” bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pengangguran di provinsi Jambi, hal ini berarti dengan adanya kenaikan inflasi maka pengangguran terbuka di Provinsi Jambi akan mengalami penurunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eni, (1967) yang berjudul “Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Medan” bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kota Medan.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Kasanah dkk., (2018) yang berjudul “Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014” menunjukkan bahwa pengaruh angkatan kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat pengangguran terbuka, artinya semakin banyak jumlah tenaga kerja maka semakin tinggi pula pengangguran terbuka. Sedangkan di dalam penelitian

Puspadjuita, (2017) yang berjudul “Factors that Influence the Rate of Unemployment in Indonesia” menunjukkan bahwa pengaruh angkatan kerja mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Prawoto & Sisnita, (2017) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung (Periode 2009-2015)” menunjukkan bahwasanya pengaruh Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan karena Provinsi Lampung masih belum secara maksimal membangun Indeks Pembangunan Manusia. Melainkan hal ini yang bertentangan di dalam penelitian Helvira & Rizki, (2020) yang berjudul “Pengaruh Investasi, Upah Minimum Dan Ipm Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Kalimantan Barat” menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk., (2017) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015” menyatakan bahwa UMK terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 menunjukkan hubungan yang positif. Sedangkan yang bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawoto & Sisnita, (2017) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung (Periode 2009-

2015)” bahwa Upah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran, hal ini menunjukkan jika perubahan upah minimum tidak akan mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.

Dalam Riset terdahulu yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Lampung Periode 2009-2015” maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul yaitu “ANALISIS PENGARUH INFLASI, ANGKATAN KERJA, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011-2022”.

B. Batasan Masalah

Dilihat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan menentukan batasan masalah agar sasaran pembahasan tercapai. Peneliti akan melakukan pembahasan penelitian dengan menggunakan Analisis pengaruh Inflasi, Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Kabupaten/kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2022?
2. Bagaimana pengaruh Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2022?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2022?
4. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2022?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2022
2. Untuk Menganalisis pengaruh Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2022
3. Untuk Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2022

4. Untuk Menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2022

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para calon peneliti yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan para calon peneliti.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dan ilmu keperluan riset yaitu membutuhkan data dan sumber teruntuk para calon peneliti.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan keperluan data dan variabel para calon peneliti

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan kemampuan secara ilmiah melalui penelitian ini.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara membaca, memahami, dan menelaah penelitian-penelitian yang telah dipasifkan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu pertimbangan untuk memutuskan kebijakan guna menjaga kestabilan perekonomian nasional.